



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Bendahara dan PPTK TP PKK Lebong Diperiksa Jaksa

LEBONG - Penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun Anggaran (TA) 2019 terus berlanjut. Selasa, 21 Januari 2025, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong memeriksa Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana TP-PKK 2019.

Pantauan RB, Bendahara TP-PKK 2019, berinisial DR datang ke Kantor Kejaksaan menggunakan mobil jenis Toyota Pajero warna hitam. Setiba di kantor

Kejaksaan, ia langsung menuju ruang Pidana Khusus (Pidsus) untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan secara tertutup itu berlangsung lebih kurang 2 jam. Kemudian, PPTK TP-PKK 2019 juga nampak hadir di Kantor Kejari Lebong. Kajari Le-

bong, Evi Hasibuan, SH., MH, melalui Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH MH membenarkan pemeriksaan terhadap Bendahara dan PPTK TP-PKK 2019.

"Iya kita melakukan pemeriksaan (Bendahara dan PPTK, red)," kata Kasi Pidsus, Selasa, 21 Januari 2025.

Keduanya diperiksa sebagai saksi, untuk mencari tahu kebenaran laporan yang disampaikan masyarakat kepada Kejaksaan. Selain Bendahara dan PPTK, Kejaksaan memastikan akan memanggil semua pihak yang mengetahui persoalan dana TP-PKK 2019, termasuk akan memanggil Ketua TP PKK saat itu.

"Karena saat ini kita masih Pulbaket dan Puldata (Pengumpulan Bahan Keterangan dan Pengumpulan Data, red)," ujarnya.

Saat ini, terang Robby Kejari Lebong sedang mendalami aliran dana dan potensi Kerugian Negara (KN) yang timbul dalam

dugaan penyimpangan dana TP-PKK 2019. "Nominal anggarannya masih kami dalam," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, pelapor dugaan penyalahgunaan dana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mempertanyakan alasan Kejati hanya menindak lanjuti dana TP-PKK 2019. Pasalnya yang dilaporkan di Kejati Bengkulu adalah dana TP-PKK 2019, 2020, 2021 dan 2024.

Sayangnya, laporan yang disampaikan Jois Maradona di Kejati Bengkulu hanya ditindaklanjuti TA 2019 saja. Atas hal ini, Jois Maradona selaku pelapor kasus ini, akan mempertanyakan kepada Kejati Bengkulu.

"Kenapa hanya 2019, nanti akan kita pertanyakan lagi di Kejati," ujarnya.

Senin pagi, 20 Januari 2025, Jois Maradona diperiksa Kejari Lebong terkait laporan tersebut. Usai diperiksa Jois menjelaskan, bahwa dirinya mendatangi Kejari Lebong untuk dimintai keterangan atas laporan yang ia sampaikan di Kejati Bengkulu.

"Kejaksaan mempertanyakan hal yang sudah kita laporkan di Kejati kemarin, yaitu masalah PKK tahun 2019," bebernya.

Saat diperiksa, terang Jois, ia diberi pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Namun, ia enggan membeberkan apa saja yang ditanyakan pihak Kejaksaan.

"Yang ditanyakan kepada saya lebih dari 15 pertanyaan. Yang ditanya seputaran laporan itu saja," tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong membidik penggunaan dana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

Untuk nominal anggaran TP-PKK yang dibidik Kejari Lebong, belum diketahui. Pihak Kejari Lebong maupun pihak pelapor juga belum mau mengungkap nominal anggaran TP-PKK 2019.

"Dapat saya informasikan, pada 15 Januari 2025, Ibu Kajari Negeri Lebong memerintahkan Bidang Pidsus untuk melakukan Pulbaket penggunaan dana PKK 2019," kata Kajari Lebong, Evi Hasibuan, SH., MH, melalui Kasi Pidana Khusus, Robby Rhaditio Dharma, SH., MH, Senin, 20 Januari 2025.

Diterangkan Robby, laporan penyalahgunaan dana TP-PKK 2019 dilaporkan masyarakat Lebong kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Kemudian, kasus itu dilimpahkan ke Kejari Lebong selaku pemilik wilayah.

"Jadi saat ini kami masih mencari keterangan dari semua pihak," ujarnya.

Senin pagi, 20 Januari 2025, Pidsus Kejari Lebong sudah memanggil dan memeriksa terlapor, dalam hal ini Jois Maradona. Setelah selesai memeriksa saksi Pelapor, tidak begitu lama, Pidsus Kejari Lebong memastikan akan langsung memeriksa para terlapor dan beberapa saksi lainnya.

"Karena ini pemeriksaan pertama jadi kita periksa saksi pelapor terlebih dahulu. Untuk mencari tahu seperti apa laporan yang dibuat," ucapnya.

Dari informasi diterima RB, laporan yang dilayangkan masyarakat di Kejati Bengkulu, adalah penggunaan dana TP-PKK Lebong TA 2019, 2020, 2023 dan 2024.

"Sudah saya jelaskan, bahwa laporan ini masuk di Kejati Bengkulu, kita hanya menerima limpahan dari Kejati untuk menindak lanjuti laporan dana PKK 2019," tutupnya. (eng)